

# Global Economy Brief

**Maret  
/2021**



**CENTER FOR INDONESIA  
TAXATION ANALYSIS**

**CITA**

*For A Better Tax Policy*

# Contents

## NEWS

### **UK Budget, US jobs report, Biden's stimulus bill**

Financial Times, February, 28, 2021 (3)

### **Australia's Treasurer Warns Global Stimulus Threatens Financial Stability**

By: Jamie Smyth

Financial Times, March, 3, 2021 (4)

### **Global government bonds hit by fresh wave of selling**

By : Robin Wigglesworth

Financial Times, March 22, 2021 (5)

## ARTICLES

### **Fiscal Follies in the COVID Recovery**

Mar 5, 2021

DANIEL GROS (7)

### **Sequencing the Post-COVID Recovery**

Mar 16, 2021

ROBERT SKIDELSKY (8)

### **An Economist's Guide to the World in 2050**

By Tom Orlik and Bjorn Van Roye (8)

### **Are Inflation Fears Justified?**

Mar 1, 2021

KENNETH ROGOFF (10)

### **Tax Havens Are Sabotaging the SDGs**

Mar 1, 2021

YU YONGDING (11)

## NEWS

### **UK Budget, US jobs report, Biden's stimulus bill**

Financial Times, February, 28, 2021

#### **UK Budget**

Menteri Keuangan UK, Rishi Sunak, hari rabu nanti akan mengumumkan skema anggaran hibah senilai £5 miliar untuk toko, pub, hotel, dan usaha lainnya yang terdampak pandemi covid-19. Ini artinya, total anggaran untuk hibah menjadi £25 miliar.

Sementara itu skema hibah baru lainnya senilai £18.000 untuk membantu perusahaan-perusahaan di Inggris akan berlaku hingga 21 Juni.

Adapun harapan lainnya terhadap Sunak adalah skema cuti yang akan diperpanjang hingga bulan Juni.

Skema hibah yang dikelola oleh pemerintah daerah ini akan membantu kurang lebih 700.000 toko, pub, klub, hotel, restoran, pusat kebugaran, dan salon.

Sunak berharap bisa menyempurnakan slogan pemerintah "build back better".

#### **US Stimulus**

Minggu ini rencana stimulus Biden sebesar \$1,9 triliun akan berada di tahapan pertimbangan senat. Pada akhir pekan, The Democratic-controlled House mengesahkan UU yang mana berisi paket stimulus berupa pembayaran langsung kepada individu sebesar \$1.400, perpanjangan top-up untuk asuransi pengangguran, dan tambahan anggaran \$350 miliar untuk pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah.

RUU terbaru juga mencakup kenaikan upah minimum secara bertahap dari \$7,25 per jam menjadi \$15 per jam selama 5 tahun. Namun, ketentuan ini mengalami kendala karena anggota senat memutuskan bahwa ketentuan tersebut tidak bisa didorong melalui rekonsiliasi anggaran.

Senat terbagi 50-50, antara democrat dan republic. Pemungutan suara dalam parlemen US adalah tonggak penting bagi Biden, yang telah menjadikan paket stimulus sebagai prioritas utama dalam 100 hari pertamanya di Gedung Putih.

#### **Economic Data and Central Banks**

The monthly US employment report yang keluar pada hari Jumat diperkirakan akan menunjukkan perekrutan yang meningkat tajam pada bulan Februari jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Di bulan desember 2020, AS kehilangan 227.000 pekerjaan. Di Januari, perekrutan kembali meningkat sebanyak 49.000 pekerjaan. Hal ini dipicu redanya infeksi virus corona dan percepatan vaksinasi.

Melalui survey Bloomberg, para ekonom memperkirakan AS akan menambah 145.000 pekerjaan di bulan Februari. Prospek terjadi recovery ini didukung oleh data yang dirilis Kamis lalu yang menunjukkan pengajuan tunjangan pengangguran turun ke level terendah pertama kali dalam tiga bulan terakhir.

Sementara itu, inflasi yang terjadi di wilayah Eropa mencapai level tertinggi di Januari semenjak dimulainya pandemi. Banyak ekonom memperkirakan kenaikan stabil selama musim semi karena biaya energy yang tinggi, gangguan rantai pasokan yang terus berlanjut yang telah menaikkan biaya bagi pengecer dan produsen, dan pemotongan PPN di Jerman.

Sumber: <https://www.ft.com/content/70d6e910-823b-45a9-8d97-1ce36fecb485>

### **Australia's Treasurer Warns Global Stimulus Threatens Financial Stability**

By: Jamie Smyth

Financial Times, March, 3, 2021

Australia telah memperingatkan bahwa upaya stimulus global yang belum pernah terjadi sebelumnya selama pandemi virus korona menciptakan risiko stabilitas keuangan yang hanya akan meningkat ketika suku bunga naik.

Josh Frydenberg, bendahara Australia, mengatakan negara Pasifik berada dalam posisi ekonomi yang kuat karena utang bersihnya terhadap PDB sekitar setengah dari negara-negara maju lainnya. "Tidak diragukan lagi, kenaikan tingkat utang akan menimbulkan tantangan bagi banyak negara. Sementara suku bunga global rendah, tingkat utang tersebut dapat digunakan, tetapi akan ada saat dimana pengaturan kebijakan moneter berubah," katanya kepada Financial Times.

Australia akan menjadi salah satu negara maju pertama yang mengurangi stimulus fiskal Covid-19 dengan penutupan skema subsidi gaji JobKeeper senilai A\$ 90 miliar (US \$ 70 miliar) bulan ini. Canberra berpendapat bahwa pemulihan sedang berlangsung seiring dengan penurunan pengangguran menjadi 6,4 persen pada Januari dan ekspansi ekonomi 3,3 persen dalam tiga bulan ini jika dibandingkan dengan September 2020.

Frydenberg mengatakan stimulus pemerintah sebesar A \$ 250 miliar diperlukan untuk menstabilkan ekonomi selama pandemi. Namun JobKeeper, yang membantu 3,6 juta

pekerja, tidak lagi diperlukan karena pemulihan dapat didukung oleh pemotongan pajak.

Namun serikat pekerja dan bisnis yang masih menderita akibat penutupan perbatasan dan pembatasan, terutama di sektor pariwisata dan hiburan, telah memperingatkan bahwa penutupan skema tersebut akan merusak perekonomian.

Frydenberg mengatakan Australia tidak sendirian dalam memperketat aturannya, mencatat bahwa negara-negara lain memiliki pandangan yang sama dengan Canberra tentang kedaulatan nasional dan investasi asing.

Sumber: <https://www.ft.com/content/db824f68-43fa-4292-93a1-04a871aedc60>

---

## **Global government bonds hit by fresh wave of selling**

**By : Robin Wigglesworth**

Financial Times, March 22, 2021

Penjualan obligasi pemerintah secara global pada hari Rabu mendalam, dengan yield US Treasury 10 tahun melonjak di atas 1,4 persen untuk pertama kalinya sejak dimulainya krisis virus corona.

Imbal hasil Treasury 10 tahun naik sebanyak 0,09 poin persentase pada hari Rabu mencapai 1,4337 persen, setelah memulai tahun ini di kisaran 0,9 persen. Treasuries jangka panjang menghadapi penjualan yang lebih intens karena mereka lebih rentan terhadap perubahan ekspektasi inflasi.

Pasar obligasi global mengalami awal terburuknya selama setahun sejak 2015 karena investor semakin yakin bahwa peluncuran vaksin Covid-19 akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi yang serius untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

The Bloomberg Barclays Multiverse index melacak utang senilai \$ 70 triliun telah kehilangan sekitar 1,9 persen sejak akhir tahun lalu karena pengembalian total memperhitungkan perubahan harga dan pembayaran bunga. Jika dipertahankan, ini akan menjadi kinerja kuartalan terburuk sejak pertengahan 2018 dan kemunduran kuartal pertama paling tajam untuk ukuran fixed-income yang luas dalam enam tahun.

Sementara itu, imbal hasil Bund 10-tahun Jerman telah meningkat dari minus 0,62 persen pada pertengahan Desember menjadi 0,29 persen pada Rabu. Imbal hasil obligasi 10-tahun Australia telah melampaui level pra-pandemi dan naik 0,05 persen poin lagi pada Rabu untuk mencapai 1,61 persen, sementara Jepang pekan ini melonjak di atas 0,1 persen untuk pertama kalinya sejak 2018.

Pembalikan pasar obligasi mulai mengumpulkan kekuatan di bulan Januari, ketika Demokrat memenangkan kendali Senat AS dan meningkatkan prospek paket stimulus yang lebih kuat untuk mengembalikan perekonomian yang terpuruk oleh pandemi. Tetapi aksi jual telah dipercepat dan meluas beberapa pekan terakhir. Hal ini karena beberapa analis dan investor mulai lebih optimis tentang prospek ekonomi dan mempertanyakan apakah bank sentral akan terus menjaga kebijakan moneter tetap akomodatif.

Penjualan fixed-income mulai terjadi melalui ekuitas global, dan membuat beberapa analis memprediksi pengulangan pertempuran masa lalu antara pasar obligasi dan pengeluaran pemerintah yang boros serta bank sentral.

Analis mengatakan secara historis imbal hasil obligasi yang rendah telah menjadi bahan bakar utama di seluruh pasar keuangan sejak titik nadir pada Maret 2020. Saham sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa kenaikan imbal hasil mulai menggigit. Pasar saham memulai tahun 2021 dengan tekanan, tetapi FTSE All-World Index sekarang telah merosot 2,5 persen sejak mencapai rekor tertinggi pada 16 Februari. Indeks Nasdaq 100 yang sangat padat teknologi kini telah turun lebih dari 6 persen sejak puncaknya pekan lalu .

Tantangannya adalah bahwa bank sentral telah berkomitmen untuk menjaga kebijakan moneter sangat mudah bahkan jika inflasi tidak meningkat.

Bank sentral tampaknya mulai gelisah dengan aksi jual, yang berpotensi menaikkan suku bunga pinjaman pada saat yang sulit bagi ekonomi global. Reserve Bank of Australia memulai kembali pembelian obligasi minggu ini untuk memadamkan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintahnya, dan presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde pada hari Senin mengatakan bahwa pembuat kebijakan "memantau dengan cermat" situasi tersebut.

Sumber: <https://www.ft.com/content/9fbafac5-02a9-43dd-ab61-b2ca05cb5264>

---

**ARTICLES****Fiscal Follies in the COVID Recovery**

Mar 5, 2021

DANIEL GROS

Dengan terus dibukanya keran fiskal di berbagai negara, kita perlu mempertimbangkan apakah stimulus tambahan benar-benar sesuai dengan tuntutan situasi. Berbeda dengan pasca krisis 2008, masalah saat ini bukanlah kurangnya daya beli, melainkan keadaan unik dari pandemi Covid-19.

Salah satu pelajaran besar dari krisis 2008 mengenai kebijakan fiskal mungkin perlu untuk diabaikan saat ini. Sudah menjadi kebijaksanaan umum bahwa pengurangan defisit fiskal setelah tahun 2009 merupakan sebuah kesalahan. Menurut narasi ini, penyeimbangan kembali akun sektor publik melalui "penghematan" (kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran) mengakibatkan pemulihan yang sangat lambat. Bahkan IMF kini telah mengubah posisinya dalam masalah utang pemerintah.

Namun, pembuat kebijakan harus bertanya, apakah pelajaran kebijakan fiskal dari krisis terakhir dapat diterapkan saat ini. Kesenjangan output yang bertahan di beberapa sektor tidak mencerminkan kurangnya pendapatan yang dapat dibelanjakan, melainkan pembatasan mobilitas dan keraguan umum di pihak konsumen yang takut keluar rumah saat virus corona masih beredar.

Dalam keadaan ini, pemerintah perlu terus menanggung mereka yang menganggur karena pandemi. Saat kebijakan lockdown dicabut, dukungan ini dapat dihapus secara bertahap. Namun demikian, "kesenjangan PDB" akan lambat pulih sebab banyak sektor akan terus beroperasi di bawah kapasitas normal untuk beberapa waktu mendatang. Bahkan, IMF memprediksikan bahwa beberapa negara harus menunggu hingga 2022 sebelum kembali ke PDB sebelum krisis.

Meskipun demikian, pengalaman tahun-tahun lalu menunjukkan bahwa tambahan transfer skala besar hanya akan ditabung. Ini menyiratkan bahwa stimulus tambahan akan memiliki efek pengganda yang rendah pada permintaan agregat.

Mengingat bahwa stimulus permintaan agregat menjadi kurang efisien dalam krisis dan pemulihan sektoral, dalam kasus ini tidak seharusnya kita menilai defisit dengan metrik yang digunakan selama resesi normal. Dalam keadaan saat ini, kesenjangan output dan tingkat pengangguran sama-sama menyesatkan, karena keduanya mencerminkan efek pandemi pada berbagai sektor, bukan kelemahan umum permintaan.

Dari sudut pandang ini, tidak diperlukan paket fiskal \$ 1,9 triliun yang sekarang sedang menuju persetujuan di AS. Meskipun sebagian besar perdebatan AS telah dipenuhi oleh kekhawatiran tentang inflasi, itu bukanlah masalah utamanya. Jika sebagian besar transfer baru ke rumah tangga akan disimpan, stimulus tambahan kemungkinan tidak akan menghasilkan banyak permintaan tambahan, yang berarti hal itu juga tidak mungkin memicu tekanan inflasi.

Sumber: <https://www.project-syndicate.org/commentary/ folly-of-additional-deficit-financed-fiscal-stimulus-in-2021-by-daniel-gros-2021-03>

---

## **An Economist's Guide to the World in 2050**

By Tom Orlik and Bjorn Van Roye

Dalam tulisan ini, Bloomberg Economics memprediksi bahwa pada tahun 2035 China yang akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia menggeser dominasi Amerika Serikat, dan mungkin aktor politiknya juga akan menjadi yang paling kuat. Selain itu, dengan perhitungan kuantitatif dan komprehensif didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pusat ekonomi bergeser dari Barat ke Timur, dari ekonomi maju ke pasar berkembang, dari pasar bebas ke kontrol negara, dan dari demokrasi mapan menjadi penguasa otoriter dan populis.

Asia akan kembali menjadi pusat ekonomi global, dengan porsi PDB global hampir 60% pada tahun 2050, meningkat tajam dari sekitar 20% di tahun 2000. Lalu, pada tahun 2050 Indonesia mungkin telah memasuki liga besar perekonomian dengan berada di peringkat 5 besar. Selain itu, Bloomberg Economics dan Heritage Foundation juga memprediksi bahwa pangsa perekonomian dari negara dengan ekonomi "bebas" akan turun dari 57% pada tahun 2000 menjadi 33% pada tahun 2050, sedangkan perekonomian dari negara yang kendali ekonomi pemerintahnya tinggi akan meningkat dari 12% menjadi 43%.

Sumber: <https://www.bloomberg.com/graphics/2020-global-economic-forecast-2050/?srnd=new-economy-forum&sref=r2r3G73s>

---

## **Sequencing the Post-COVID Recovery**

Mar 16, 2021

ROBERT SKIDELSKY

Ketika negara-negara dilanda pandemi COVID-19, penekanan John Maynard Keynes pada perlunya menerapkan kebijakan ekonomi pasca krisis menjadi sangat relevan. John Maynard Keynes adalah pendukung setia Kesepakatan Baru (*New Deal*) Presiden AS Franklin D. Roosevelt. Tapi Keynes bukannya tidak kritis terhadap FDR. Secara khusus, dia menyalahkan Roosevelt karena mencampur pemulihan dan reformasi. Pemulihan dari keterpurukan adalah prioritas pertama; reformasi sosial, "meskipun



bijaksana dan sangat penting”, dapat menghalangi pemulihan dengan merusak kepercayaan bisnis. Keynes berpendapat, pengurutan (*sequencing*) yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan.

Para penasihat dalam "brain trust" FDR adalah para seorang reformis, bukan Keynesian, dan memiliki pandangan yang berbeda. Dengan mengaitkan Depresi Hebat dan kekuatan perusahaan yang berlebihan, mereka mengira bahwa jalan menuju pemulihan terletak pada perubahan kelembagaan. Akibatnya, apa yang disebut stimulus Keynesian adalah komponen kecil dari New Deal.

Keynes sendiri berulang kali berargumen bahwa pengeluaran ekstra dari New Deal tidak cukup untuk memulihkan ekonomi secara penuh. Paket stimulus total FDR sebesar \$ 42 miliar sebagian besar dihabiskan dalam tiga tahun pertama masa kepresidenannya, yang berjumlah sekitar 5-6% dari PDB AS pada saat itu.

Paul Krugman mengatakan hal yang sama tentang stimulus Presiden Barack Obama tahun 2009 sebesar \$ 787 miliar, yang mencapai 5,5% dari PDB. Atas dasar perhitungan yang tidak pasti tersebut, rencana penyelamatan ekonomi sebesar \$ 1,9 triliun dari Presiden Joe Biden, setara dengan 9% dari PDB saat ini, tampaknya benar.

Keynes berbicara tentang stimulus fiskal. Dia terkenal skeptis terhadap stimulus moneter yang diterapkan oleh Presiden Herbert Hoover pada tahun 1932 dan FDR pada tahun 1933 – sekarang. Skema yang paling kontroversial, pembelian emas besar-besaran, dirancang untuk mengimbangi jatuhnya harga komoditas. Faktanya, pembelian emas skala besar oleh Departemen Keuangan AS dan Administrasi Keuangan Rekonstruksi gagal untuk menggerakkan harga komoditas.

Demikian pula, Keynes mengkritik ketentuan Administrasi Pemulihan Nasional FDR yang mencoba merekayasa pemulihan dengan memperkuat posisi tenaga kerja. Ia pun berpikir hal ini adalah hal yang salah.

Keynes khawatir bahwa menggabungkan pemulihan dan reformasi membuat administrasi FDR "memikirkan terlalu banyak hal sekaligus". Penekanan Keynes tentang pentingnya pengurutan kebijakan yang tepat sangat relevan untuk saat ini. Namun, saat kita keluar dari pandemi COVID-19, perbedaan antara pemulihan dan reformasi—serta akibat antara kebijakan makro dan mikro berjangka pendek dan panjang—terlihat lebih kabur daripada apa yang dilihat Keynes (dan pemikir lainnya) di tahun 1930-an.

Sebagai contoh, kebijakan "full-employment" sekarang jelas terkait dengan kemampuan kerja (*employability*). Ini tidak terjadi pada tahun 1930-an. Alasan mengapa begitu banyak orang kehilangan pekerjaan saat itu bukanlah karena mereka

tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, tetapi karena permintaan agregat tidak mencukupi.

Namun di era otomatisasi saat ini, tidak ada pemerintah yang mampu bersikap angkuh terhadap keberlanjutan lapangan kerja. Faktanya, pada awal 1930, Keynes meramalkan pengangguran teknologi sebagai masalah yang berada di luar lingkup manajemen permintaan.

Sejak itu, ancaman pemutusan hubungan kerja yang semakin cepat telah memperbesar apa yang disebut Keynes sebagai "agenda" pemerintah. Secara khusus, negara harus secara terpusat memperhatikan kecepatan inovasi teknologi, pilihan teknologi, dan distribusi keuntungan produktivitas yang dimungkinkan oleh teknologi. Saat ini, reformasi ekonomi membayangi pemulihan ke tingkat yang jauh lebih besar daripada ketika Keynes membedakan keduanya. Namun caranya mengatur hubungan keduanya adalah titik awal yang baik untuk membangun pemulihan dan reformasi dengan lebih baik.

Sumber: <https://www.project-syndicate.org/commentary/keynes-criticism-of-new-deal-relevant-to-covid19-by-robert-skidelsky-2021-03>

---

## **Are Inflation Fears Justified?**

Mar 1, 2021

KENNETH ROGOFF

Dalam waktu dekat, pasar tidak perlu terlalu khawatir tentang lonjakan permintaan yang mendorong inflasi dan suku bunga, yang menyebabkan harga aset turun secara keseluruhan. Program stimulus fiskal dan moneter besar-besaran di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya memicu perdebatan sengit tentang apakah inflasi yang lebih tinggi akan segera terjadi.

Untuk lebih jelasnya, dukungan makro ekonomi yang sangat besar sangat dibutuhkan saat ini dan di masa mendatang. Resesi yang dipicu pandemi lebih buruk daripada krisis keuangan global 2008, dan sebagian ekonomi AS masih dalam kesulitan. Selain itu, meski ada perkembangan terkait vaksin yang menjanjikan dalam perang melawan virus corona, keadaan bisa menjadi lebih buruk.

Dengan latar belakang ini, risiko inflasi riil dapat terwujud jika independensi bank sentral dan globalisasi tidak disukai. Tetapi ini tidak mungkin menyebabkan ledakan inflasi. Bahkan butuh waktu bertahun-tahun ketika inflasi mencapai dua digit di banyak negara kaya seperti pada tahun 1970-an (naik di atas 20% di Inggris dan Jepang).

Ini karena kecepatan antara harga dan upah yang naik sangat sensitif terhadap pekerja, dan perusahaan memandang dinamika inflasi yang mendasari perekonomian. Artinya, inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi jangka panjang.

Ini mencerminkan fakta bahwa di banyak sektor, perusahaan enggan menaikkan harga terlalu agresif karena takut kehilangan pangsa pasar. Jadi, jika bank sentral berhasil "menahan" ekspektasi inflasi jangka panjang pada tingkat yang rendah, mereka dapat menghentikan ledakan inflasi yang berkepanjangan.

Semua ini menyiratkan bahwa dengan normalisasi ekonomi yang cepat, permintaan yang terpendam dan stimulus fiskal yang besar tidak akan memicu lonjakan inflasi secara langsung.

Banyak orang yang jauh lebih skeptis tentang globalisasi saat ini daripada tiga dekade lalu, terutama karena bukti yang menunjukkan bahwa orang kaya mendapat manfaat yang tidak proporsional darinya. Secara lebih luas, upaya disinflasi bank sentral dari tahun 1980 hingga krisis keuangan 2008 memperoleh manfaat yang sangat besar dari hiper globalisasi yang terjadi selama periode ini.

Dengan produktivitas yang meningkat dan banyak harga yang terlihat turun karena alasan di luar kebijakan moneter, maka menjadi relatif mudah bagi bank sentral untuk menurunkan ekspektasi inflasi jangka panjang publik.

Segalanya sekarang bisa bergerak ke arah lain, terutama mengingat konsensus politik bipartisan yang kuat di Washington tentang perlunya menantang China. Substansi kebijakan Biden mungkin tidak berbeda dari kebijakan yang diterapkan oleh mantan Presiden Donald Trump secepat atau seradikal yang diharapkan oleh banyak internasionalis.

Sumber: <https://www.project-syndicate.org/commentary/long-term-inflation-risks-central-banks-globalization-by-kenneth-rogooff-2021-03?>

---

## **Tax Havens Are Sabotaging the SDGs**

Mar 1, 2021

YU YONGDING

Pada tanggal 25 September 2015, kepala negara dan pemerintahan dunia mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk membangun dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Kendala terbesar bagi negara-negara yang berusaha mencapai SDGs adalah kurangnya sumber daya keuangan. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah menunjukkan tanda-tanda kesulitan utang.

Ada cara-cara untuk mengumpulkan dana. Negara-negara dapat meningkatkan tabungan dalam negeri, menarik investasi asing, dan mencari bantuan pembangunan dari negara-negara kaya, organisasi internasional, dan bank pembangunan multilateral. Tetapi melakukan hal itu tidak pernah mudah terutama di dunia di mana aliran keuangan gelap berkembang pesat.

Pada tahun 2015, Gabriel Zucman memperkirakan bahwa setidaknya \$ 7,6 triliun kekayaan milik pribadi tersimpan di tax haven, hal ini setara dengan 8% aset keuangan rumah tangga global. Angka itu telah tumbuh secara mengejutkan sebesar 25%. Pada 2017, Biro Riset Ekonomi Nasional melaporkan bahwa sekitar 10% dari PDB dunia disimpan di tax haven.

Pemerintah memiliki garis pertahanan utama terhadap aliran keuangan gelap. Pertama, mengurangi jumlah uang ilegal yang ada, yaitu dengan memberantas korupsi. Selain kejahatan yang mencolok, seperti penggelapan pajak, penyuapan, dan penggelapan aset publik, upaya tersebut harus bisa mengatasi manuver dengan lebih halus. Seperti celah dalam eksploitasi dalam kode pajak oleh perusahaan multinasional dan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang melemahkan kemampuan negara untuk mendanai pembangunan.

Kedua, pengelolaan arus modal lintas batas yang cermat. Sehingga, pemerintah harus secara agresif melacak, menyita, dan memulangkan dana gelap. Namun, memulihkan dana semacam itu merupakan hal yang rumit, mahal dan kontroversial. Maka dari itu sangat sedikit uang ilegal yang dapat di kembalikan ke pemilik yang sah.

Meskipun sejumlah inisiatif, program, perjanjian, konvensi, dan perjanjian internasional telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir untuk mengurangi aliran keuangan gelap, semuanya terbukti jauh dari kata memadai.

Saat ini, Panel FACTI telah merilis laporan komprehensif, guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya, panel mendesak semua negara untuk memberlakukan undang-undang yang menyediakan perangkat hukum seluas mungkin yang akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan keuangan lintas batas.


Panel FACTI juga mendukung kerja sama internasional yang jauh lebih besar, seperti pembentukan norma perpajakan global, khususnya standar transparansi, melalui instrumen hukum yang "terbuka dan inklusif".

Sumber: <https://www.project-syndicate.org/commentary/sdgs-tax-havens-illicit-financial-flows-development-by-yu-yongding-2021-03>

---

**Contact Us:**

 @CITA\_Research

 @cita\_risetfiskal

 @CITAResearch

 CITA Research

